

MANUAL IKU
SUBSEKSI PROGRAM DAN EVALUASI
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL) SORONG

1. JUMLAH PROVINSI DI WILAYAH KERJA LPSPL SORONG YANG MEMILIKI RENCANA ZONASI DITETAPKAN MELALUI PERATURAN PERUNDANGAN

Perspective	:	<i>Internal Process Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP di wilayah kerja LPSPL Sorong yang berdaya saing dan berkelanjutan
Nama IKU	:	Jumlah Provinsi di wilayah kerja LPSPL Sorong yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan (provinsi)
Definisi	:	<p>Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dewasa ini sangat gencar melakukan pembangunan di segala aspek. Daya dukung wilayah daratan akan sampai pada batas maksimal, sehingga mengharuskan pemanfaatan ruang menuju ke arah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Banyak keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh jika pembangunan mengarah pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hanya saja akan berdampak pada aspek sosial dan ekologi apabila prosesnya tidak didahului dengan perencanaan. Degradasi lingkungan dan sumberdaya hayati serta konflik sosial adalah contoh dampak yang kerap terjadi, dan hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya penataan ruang.</p> <p>Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan penyusunan struktur ruang dan pola ruang untuk ruang darat, sedangkan untuk ruang laut diatur oleh undang-undang tersendiri (pasal 6 ayat 5). Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, menjadi acuan penataan ruang laut, yang terdiri atas: (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K; (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; (3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan (4) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K. Pola ruang dan</p>

		<p>struktur ruang akan diakomodir dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).</p> <p>Dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 jo. Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada pasal 7 (ayat 3) Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terbitnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan pengalihan beberapa kewenangan pengelolaan bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat provinsi.</p>			
Teknik Menghitung	:	Jumlah provinsi yang didampingi dalam penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).			
Satuan pengukuran		Provinsi			
Jenis Aspek target		Kuantitas			
Tingkat Validitas IKU		Lag Output			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU		Sub Seksi Program dan Evaluasi			
Sumber data		Direktorat Perencanaan Ruang Laut			
Status Data		Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data		Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading		Adopsi Langsung			
Polarisasi		Maximize			
Periode Pelaporan		Tahunan			
Tabel Data		Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019
		-	4	4	2

2. PRESENTASE PEMENUHAN DOKUMEN REFORMASI BIROKRASI LINGKUP LPSPL SORONG

Perspective	:	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya birokrasi LPSPL Sorong yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Nama IKU	:	Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Lingkup LPSPS Sorong (%)
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Nilai kinerja RB DJPRL diperoleh dari Indeks RB hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: (i) manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (ii) peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (iii) organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); (iv) tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; (v) sdm aparatur; sdm aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (vi) akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (vii) pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn; (viii) pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Teknik Menghitung	:	FORMULA Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.
Satuan pengukuran	:	Persen
Jenis Aspek target	:	Kuantitas
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Urusan Tata Usaha, Sub Seksi Program dan Evaluasi, dan Sub Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian
Sumber data	:	Kemenpan RB
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading	:	Adopsi Langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data	:	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019
		89,1	100	100	100

3. NILAI AKIP LPSPL SORONG

Perspective	:	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya birokrasi LPSPL Sorong yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Nama IKU	:	Nilai AKIP LPSPL Sorong
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • AKIP yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. • SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).
Teknik Menghitung	:	<p>Adapun teknik menghitung indikator kinerja nilai AKIP LPSPL Sorong sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian penilaian atas AKIP LPSPL Sorong dilaksanakan oleh tim Monev Ditjen PRL KKP dengan indikator-indikator sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%; • Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%; • Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%; • Evaluasi kinerja dengan bobot 10%; • Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%. 2. Masing-masing indikator tersebut memiliki sub indikator. 3. Hasil penilaian atas AKIP LPSPL Sorong tahun N didapatkan pada akhir tahun.

Satuan pengukuran	:	Nilai			
Jenis Aspek target	:	Kuantitas			
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Sub Seksi Program dan Evaluasi			
Sumber data	:	Bagian Monev DJPRL			
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Adopsi Langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data	:	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019
		85,07	85	86,16	85

4. PERSENTASE UNIT KERJA SUBSI PROGRAM DAN EVALUASI YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR (%)

Perspective	:	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Tersedianya Manajemen Pengetahuan LPSPL Sorong yang Handal dan Mudah Diakses
Nama IKU	:	Persentase unit kerja Subsi Program dan Evaluasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (Persen)
Definisi	:	Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.
Teknik Menghitung	:	Tingkat penerapan MP di Level 2UPT, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 20%) (ii) keikutsertaan (bobot 40%), (iii) keaktifan Pejabat/staf unit kerja level 1 dalam Sistem Informasi MP yang

		<p>terpilih (bobot 40%).</p> <p>FORMULA $\%MP = (40\% \times \text{Keikutsertaan}) + (40\% \times \text{Keaktifan}) + (20\% \times \text{Uploaddokumen})$</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat <i>sharing</i> dokumen : Persentase dokumen <i>mandatory</i> yang dibagikan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan 2. Tingkat keikutsertaan : Persentase pejabat level 1 sd 4 dalam suatu unit kerja Setjen yang tergabung dalam SI-MP dibanding total Pejabat level 1 sd 4 di unit tersebut di Setjen (berlaku sistem berjenjang). 3. Tingkat keaktifan : Persentase pejabat level 2 sd 4 lingkup Setjen yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total pejabat level 2 sd 4 lingkup Setjen 			
Satuan pengukuran	:	Persen (%)			
Jenis Aspek target	:	Kuantitas			
Tingkat Validitas IKU	:	Lead Process			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Sub Seksi Program dan Evaluasi			
Sumber data	:	Subbag Kehumasan Ditjen PRL			
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Lingkup Dipersempit			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Triwulan			
Tabel Data	:	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019
		55	66	76,67	80

5. PRESENTASE PEMENUHAN DOKUMEN REFORMASI BIROKRASI LINGKUP SUBSI PROGRAM DAN EVALUASI LPSPL SORONG (%)

Perspective	:	Learning and Growth Perspective
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya birokrasi LPSPL Sorong yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Nama IKU	:	Persentase Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi Lingkup Subsi Program dan Evaluasi LPSPL Sorong (%)
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). • Nilai kinerja RB DJPRL diperoleh dari Indeks RB hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: (i) manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (ii) peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (iii) organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); (iv) tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; (v) sdm aparatur; sdm aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (vi) akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (vii) pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn; (viii) pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Teknik Menghitung	:	FORMULA Akan dilaksanakan oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB.
Satuan pengukuran	:	Persen
Jenis Aspek target	:	Kuantitas
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Urusan Tata Usaha, Sub Seksi Program dan Evaluasi, dan Sub Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian

Sumber data	:	Kemenpan RB			
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Adopsi Langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data	:	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019
		89,1	100	100	100

6. PRESENTASE PEMENUNGAN DOKUMEN AKIP SUBSI PROGRAM DAN EVALUASI LPSPL SORONG

Perspective	:	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya birokrasi LPSPL Sorong yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Nama IKU	:	Presentase Pemenuhan Dokumen AKIP Subsi Program Dan Evaluasi LPSPL Sorong
Definisi	:	<ul style="list-style-type: none"> • AKIP yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. • SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).
Teknik Menghitung	:	<p>Adapun teknik menghitung indikator kinerja nilai AKIP LPSPL Sorong sebagai berikut:</p> <p>1. Pemberian penilaian atas AKIP LPSPL Sorong dilaksanakan oleh tim Monev Ditjen PRL KKP dengan indikator-indikator sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%; • Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%;

		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%; • Evaluasi kinerja dengan bobot 10%; • Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%. <p>2. Masing-masing indikator tersebut memiliki sub indikator.</p> <p>3. Hasil penilaian atas AKIP LPSPL Sorong tahun N didapatkan pada akhir tahun.</p>			
Satuan pengukuran	:	Nilai			
Jenis Aspek target	:	Kuantitas			
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output			
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Sub Seksi Program dan Evaluasi			
Sumber data	:	Bagian Monev DJPRL			
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Adopsi Langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data	:	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019
		85,07	85	86,16	85

7. PRESENTASE PEMENUHAN DOKUMEN MATURITAS SPIP LINGKUP SUBSI PROGRAM DAN EVALUASI LPSPL SORONG

Perspective	:	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Terwujudnya birokrasi LPSPL Sorong yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
Nama IKU	:	Presentase Pemenuhan Dokumen Maturitas SPIP lingkup Subsi Program dan Evaluasi LPSPL Sorong (%)

<p>Definisi</p>	<p>:</p>	<p>Maturitas (<i>maturity</i>) berarti dikembangkan penuh atau optimal (Cooke-Davis, 2005). Andersen and Jessen (2003) menyatakan bahwa konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya.</p> <p>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>Penilaian tingkat maturitas SPIP</p> <table border="1" data-bbox="581 604 1321 886"> <thead> <tr> <th colspan="2">TINGKAT MATURITAS</th> <th>INTERVAL SKOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Belum Ada</td> <td>Kurang dari 1,0 (0 < skor < 1,0)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rintisan</td> <td>1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Berkembang</td> <td>2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terdefinisi</td> <td>3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terkelola Dan Terukur</td> <td>4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Optimum</td> <td>Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)</td> </tr> </tbody> </table>	TINGKAT MATURITAS		INTERVAL SKOR	0	Belum Ada	Kurang dari 1,0 (0 < skor < 1,0)	1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)	2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)	3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)	4	Terkelola Dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)	5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)
TINGKAT MATURITAS		INTERVAL SKOR																					
0	Belum Ada	Kurang dari 1,0 (0 < skor < 1,0)																					
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)																					
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)																					
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)																					
4	Terkelola Dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)																					
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)																					
<p>Teknik Menghitung</p>	<p>:</p>	<p>Tahapan penilaian: Penilaian pendahuluan Survey persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP Pengujian Bukti Kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim <i>asesor</i> dari BPK</p> <p>Perhitungan dengan merata-rata Nilai Maturitas SPIP seluruh Eselon I yang di <i>sampling</i> oleh BPK: <u>Keterangan:</u> M_{SPIP}: Nilai Maturitas SPIP KKP NK_{1-x} : Nilai Maturitas Unit Kerja Eselon I yang di <i>sampling</i> BPK n : Jumlah Unit Kerja Eselon I yang di <i>sampling</i></p>																					
<p>Satuan pengukuran</p>	<p>:</p>	<p>Nilai</p>																					
<p>Jenis Aspek target</p>	<p>:</p>	<p>Kualitas/Mutu</p>																					
<p>Tingkat Validitas IKU</p>	<p>:</p>	<p>Lag Output</p>																					
<p>Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU</p>	<p>:</p>	<p>Urusan Tata Usaha, Sub Seksi Program dan Evaluasi, dan Sub Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian</p>																					
<p>Sumber data</p>	<p>:</p>	<p>BPK</p>																					

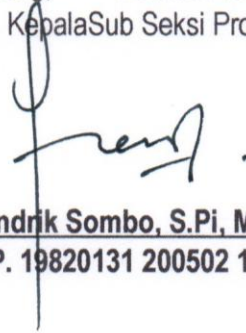
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data			
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	:	Adopsi Langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data	:	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019
		2,347	100	100	100

8. PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM DAN EVALUASI (%)

Perspective	:	<i>Learning and Growth Perspective</i>
Sasaran Strategis	:	Terkelolanya Anggaran Pembangunan LPSPL Sorong Secara Efisien dan Akuntabel
Nama IKU	:	Persentase Penyerapan anggaran Program dan Evaluasi (%)
Definisi	:	Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya Nilai diperoleh aplikasi SPAN
Teknik Menghitung	:	Penyerapan anggaran Subsidi PE = $\frac{\text{Realisasi anggaran subsidi PE}}{\text{Pagu anggaran subsidi PE}} \times 100\%$
Satuan pengukuran	:	Persen
Jenis Aspek target	:	Kuantitas
Tingkat Validitas IKU	:	Lag Output
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	Sub Seksi Program dan Evaluasi
Sumber data	:	Pengelola Keuangan Sub Seksi Program dan Evaluasi
Status Data	:	Hasil Perhitungan Raw Data
Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir

Metode Cascading	:	Adopsi Langsung			
Polarisasi	:	Maximize			
Periode Pelaporan	:	Tahunan			
Tabel Data	:	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019
					90

Sorong, Februari 2019
 Plt. KepalaSub Seksi Program dan Evaluasi



Hendrik Sombo, S.Pi, M.Si
NIP. 19820131 200502 1 001